

Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis
VOL 4, No. 1, Januari 2025, pp. 38 - 45
p-ISSN: 2809-1655 (media cetak)
e-ISSN: 2809-1981 (media online)
Link Publikasi: https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JIMEB/issue/view/144
DOI: https://doi.org/10.51903/gvhdby90

Innovation in Public Participation in Policy Formulation: An Analysis of the Utilization of Digital Musrenbang Platforms

Lutfiana Dwi Ratnasari*[1], Rafiq Nur Hidayat[2]
[1, 2] Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, 69162, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Madura, Indonesia
Email: ratnasari@gmail.com; hidayat@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : Oct 2024
Revised : Nov 2024
Accepted : Dec 2024
Published : Jan 2025

ABSTRACT

Public participation is a key element of democratic governance, yet conventional Musrenbang practices in Indonesia continue to face limitations in inclusivity, transparency, and the effective conveyance of community aspirations. The digitalization of Musrenbang is expected to address these challenges by expanding access and strengthening accountability. This study aims to analyze the extent to which digital Musrenbang platforms enhance the quality of public participation and to identify the factors that influence their effectiveness. The research employs a quantitative, cross-sectional survey design involving 200 respondents, supported by secondary data, including user activity logs and official digital Musrenbang documents. Analysis was conducted using descriptive statistics, Pearson correlations, and multiple linear regression. The findings indicate that digital Musrenbang is perceived as inclusive (72%) and transparent (81%), although the effectiveness of aspiration follow-up remains limited (62%). Digital literacy and infrastructural access are the principal determinants of participation effectiveness. This study affirms that digital Musrenbang has the potential to strengthen technology-based participatory democracy, if user capacity and accountable follow-up mechanisms are adequately supported.

Keywords: *Digital Musrenbang, Public Participation, E-Governance, Digital Literacy, Public Policy.*

OPEN ACCESS

This journal is an open-access publication. All articles are freely and permanently accessible to everyone. Copyright © 2025 by the Author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

ABSTRAK

Partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam tata kelola demokratis, namun Musrenbang konvensional di Indonesia masih menghadapi keterbatasan inklusivitas, transparansi, dan efektivitas penyaluran aspirasi. Digitalisasi Musrenbang diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut melalui perluasan akses dan penguatan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana platform Musrenbang digital meningkatkan kualitas partisipasi publik serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei potong lintang terhadap 200 responden, didukung data sekunder berupa log aktivitas pengguna dan dokumen resmi Musrenbang digital. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif, korelasi Pearson, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

Musrenbang digital dipersepsikan inklusif (72%) dan transparan (81%), namun efektivitas tindak lanjut aspirasi masih terbatas (62%). Literasi digital dan akses infrastruktur terbukti sebagai faktor penentu utama efektivitas partisipasi. Studi ini menegaskan bahwa Musrenbang digital berpotensi memperkuat demokrasi partisipatif berbasis teknologi apabila didukung kapasitas pengguna dan mekanisme tindak lanjut yang akuntabel.

Kata Kunci: Musrenbang Digital, Partisipasi Publik, *E-Governance*, Literasi Digital, Kebijakan Publik.

1. PENDAHULUAN

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis karena memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan publik (Rinawati et al., 2022; Yasin et al., 2024). Di Indonesia, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berfungsi sebagai instrumen formal yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Melalui Musrenbang, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (Muhammet Ali Heyik et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, Musrenbang konvensional masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti rendahnya partisipasi masyarakat secara luas, dominasi aktor tertentu dalam forum deliberatif, serta lemahnya mekanisme penyaringan dan tindak lanjut aspirasi publik ke dalam dokumen kebijakan.

Seiring dengan berkembangnya digitalisasi tata kelola pemerintahan, berbagai daerah di Indonesia mulai mengadopsi platform Musrenbang digital sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan mekanisme konvensional. Digitalisasi Musrenbang dipandang mampu memperluas akses partisipasi, meningkatkan transparansi proses perencanaan, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah (Setyawan et al., 2024). Sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasi e-Musrenbang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses perencanaan dan keterbukaan informasi, meskipun belum sepenuhnya menjamin bahwa aspirasi masyarakat benar-benar memengaruhi keputusan pembangunan (Anindito et al., 2022). Kondisi ini menjadi semakin relevan mengingat tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% pada tahun 2023 (APJII Indonesia, 2023), yang secara teoritis menyediakan prasyarat sosial-teknologis bagi penguatan partisipasi publik berbasis digital.

Kajian literatur menunjukkan bahwa digitalisasi partisipasi publik melalui platform daring memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas proses kebijakan. *Digital Musrenbang* memungkinkan dokumentasi proses yang lebih terbuka dan dapat ditelusuri oleh publik, sehingga memperkuat akuntabilitas perencanaan pembangunan (Gustavo De Siqueira et al., 2022). Studi lintas negara juga menunjukkan bahwa platform partisipasi digital mampu memperluas jangkauan keterlibatan warga, terutama kelompok yang sebelumnya kurang terwakili, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh literasi digital dan kondisi infrastruktur lokal (Shin et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan aspek teknis dan administratif dari implementasi e-Musrenbang, seperti efisiensi waktu, transparansi prosedural, dan peningkatan akses informasi (Putra Rizkiya et al., 2023). Di sisi lain, literatur internasional menyoroti bahwa banyak platform partisipasi digital cenderung berhenti pada dimensi prosedural dan belum secara konsisten menghasilkan dampak substantif terhadap kebijakan publik (Nincevic Pasalic & Cukusic, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan platform, tetapi juga oleh kapasitas pengguna, desain institusional, dan mekanisme tindak lanjut aspirasi.

Meskipun kajian mengenai Musrenbang digital dan partisipasi publik telah berkembang, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang masih signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peningkatan akses dan transparansi, sementara analisis mengenai kualitas partisipasi dan efektivitas aspirasi dalam memengaruhi kebijakan masih relatif terbatas (Hiroki Miura et al., 2025). Kedua, penelitian yang mengkaji Musrenbang digital di Indonesia umumnya belum secara sistematis mengintegrasikan faktor-faktor kontekstual lokal, seperti perbedaan tingkat literasi digital, kondisi infrastruktur, dan karakteristik demografis masyarakat, dalam menjelaskan variasi efektivitas partisipasi (Mohammed Adnan et al., 2022). Ketiga, masih minim penelitian empiris yang memposisikan Musrenbang digital sebagai bentuk inovasi partisipasi publik, bukan sekadar sebagai alat administratif berbasis teknologi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang memposisikan Musrenbang digital sebagai instrumen inovasi partisipasi publik dalam kerangka demokrasi partisipatif berbasis teknologi. Penelitian ini

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

tidak hanya menilai aspek teknis penggunaan platform, tetapi juga menganalisis bagaimana literasi digital, akses infrastruktur, dan faktor demografis memengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Dengan mengombinasikan data survei persepsi dan data sekunder berupa log aktivitas pengguna, penelitian ini memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi digital di tingkat lokal Indonesia, sehingga memperkaya literatur yang selama ini didominasi oleh perspektif global.

Signifikansi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian e-governance dan partisipasi digital dengan menegaskan bahwa teknologi digital bukan sekadar sarana administratif, melainkan faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi partisipatif (Cemil Eren Fırtın et al., 2025). Penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa literasi digital merupakan variabel kunci dalam menjembatani ketersediaan platform dengan efektivitas partisipasi publik.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengoptimalkan platform Musrenbang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan platform digital perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat, pemerataan infrastruktur, serta mekanisme tindak lanjut aspirasi yang transparan agar partisipasi publik tidak berhenti pada formalitas prosedural semata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan praktik tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Rancangan Survei

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei potong lintang (*cross-sectional*) untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan platform Musrenbang digital dalam meningkatkan partisipasi publik pada satu periode waktu tertentu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antarvariabel secara empiris dan objektif, khususnya antara literasi digital, akses infrastruktur, dan karakteristik demografis dengan efektivitas partisipasi masyarakat. Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian ini juga didukung oleh analisis data sekunder berupa log aktivitas pengguna dan dokumen resmi Musrenbang digital sebagai bentuk triangulasi data.

2.2. Populasi Penelitian dan Strategi Penentuan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh warga yang terdaftar sebagai pengguna platform Musrenbang digital di wilayah studi. Sampel penelitian berjumlah 200 responden, yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan stratifikasi proporsional berdasarkan wilayah domisili, kelompok usia, dan gender guna memastikan keterwakilan karakteristik sosial pengguna platform. Kriteria inklusi meliputi responden berusia minimal 17 tahun dan memiliki pengalaman menggunakan fitur partisipatif Musrenbang digital setidaknya satu kali dalam 12 bulan terakhir, sedangkan responden pasif, data ganda, atau tidak memenuhi kriteria dikeluarkan dari analisis. Jumlah sampel ini dinilai memadai untuk mendukung analisis deskriptif dan inferensial pada tingkat kepercayaan 95%. Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus proporsi dengan tingkat kepercayaan 95% dan nilai p = 0,5 dapat dilihat melalui Rumus (1).

$$n = \frac{Z^2 \cdot p(1-p)}{e^2} \qquad (1)$$

dengan Z = 1,96 dan e = 0,07. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh jumlah sampel n ≈ 196, yang kemudian dibulatkan menjadi 200 responden. Apabila ditargetkan margin of error yang lebih kecil, yaitu 5%, maka ukuran sampel ideal adalah sekitar 385 responden. Untuk mengantisipasi kemungkinan non-respons sebesar 20%, maka jumlah undangan yang disebarkan kepada calon responden adalah sekitar 250 orang agar target 200 responden dapat terpenuhi.

2.3. Mekanisme dan Tahapan Pengumpulan Data

Penelitian ini melibatkan beberapa variabel utama yang dianalisis secara kuantitatif. Variabel independen meliputi literasi digital, akses infrastruktur digital, serta faktor demografis seperti usia, domisili, dan tingkat pendidikan. Variabel dependen adalah efektivitas partisipasi publik dalam Musrenbang digital, yang diukur melalui persepsi responden terhadap inklusivitas, transparansi proses, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

ke dalam kebijakan. Hubungan antara variabel-variabel tersebut dianalisis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas partisipasi publik berbasis digital.

2.4. Instrumen Survei dan Validasi Pengukuran

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada responden yang memenuhi kriteria inklusi. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur tingkat literasi digital, akses infrastruktur, serta persepsi responden terhadap efektivitas Musrenbang digital. Validitas isi instrumen diuji melalui penilaian ahli (expert judgment), sementara reliabilitas internal diukur menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan nilai ambang $\geq 0{,}70$. Selain data primer, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa log aktivitas pengguna dan dokumen resmi Musrenbang digital untuk memperkuat dan memverifikasi temuan survei.

2.5. Teknik Analisis Statistik dan Pengolahan Data

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26 melalui beberapa tahapan analisis. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan pola partisipasi dalam Musrenbang digital. Selanjutnya, uji korelasi Pearson diterapkan untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel, sementara regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh literasi digital, akses infrastruktur, dan faktor demografis terhadap efektivitas partisipasi publik. Seluruh pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0{,}05$) dengan terlebih dahulu memastikan terpenuhinya asumsi klasik model regresi.

2.6. Urutan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis yang dimulai dengan penyusunan instrumen kuesioner dan pengajuan izin penelitian kepada instansi pemerintah daerah terkait. Instrumen kemudian diuji coba melalui pilot test untuk memastikan kejelasan dan reliabilitas pertanyaan sebelum disebarkan secara luas. Tahap berikutnya meliputi pengumpulan data primer melalui kuesioner daring dan pengumpulan data sekunder dari dokumen serta log aktivitas Musrenbang digital. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pembersihan data untuk memastikan kelayakan analisis, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis statistik dan interpretasi hasil penelitian.

2.7. Prinsip Etika dan Perlindungan Responden

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial. Setiap responden diberikan informasi yang jelas mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian sebelum menyatakan persetujuan partisipasi (informed consent). Kerahasiaan dan anonimitas data responden dijaga dengan menghilangkan identitas pribadi dan membatasi akses data hanya untuk kepentingan penelitian. Seluruh data yang dikumpulkan digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik penelitian akademik dan peraturan yang berlaku.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Hasil

3.1.1. Karakteristik Demografis Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini memberikan konteks penting untuk memahami pola partisipasi pada Musrenbang digital. Secara umum, responden didominasi oleh kelompok usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi serta lebih banyak berasal dari wilayah perkotaan. Komposisi gender relatif seimbang, yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam Musrenbang digital tidak dipengaruhi secara signifikan oleh perbedaan jenis kelamin. Dominasi responden perkotaan mengindikasikan bahwa akses infrastruktur digital masih menjadi faktor kontekstual yang berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat. Kondisi ini menjadi landasan penting dalam menafsirkan perbedaan efektivitas partisipasi pada subbagian hasil berikutnya. Tabel 1 menyajikan rincian lengkap karakteristik demografis responden, sementara Gambar 1 memberikan visualisasi distribusi responden berdasarkan domisili.

Gambar 1 tidak dimaksudkan untuk mengulang distribusi numerik domisili responden sebagaimana telah disajikan pada Tabel 1, melainkan untuk menegaskan konteks struktural partisipasi digital. Dominasi responden perkotaan pada visual ini memperlihatkan bahwa partisipasi dalam Musrenbang digital masih sangat dipengaruhi oleh faktor spasial dan ketersediaan infrastruktur. Dengan demikian, perbedaan domisili

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

bukan sekadar karakteristik demografis, tetapi merupakan indikator awal adanya kesenjangan kapasitas partisipasi digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Tabel 1. Karakteristik Demografis Responden (N = 200)

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Usia	17–30 tahun	85	42,5
	31–45 tahun	67	33,5
	>45 tahun	48	24,0
Jenis Kelamin	Laki-laki	104	52,0
	Perempuan	96	48,0
Domisili	Perkotaan	128	64,0
	Perdesaan	72	36,0
Pendidikan	SMA/sederajat	54	27,0
	Diploma/Sarjana	110	55,0
	Pascasarjana	36	18,0



Gambar 1. Dominasi Partisipasi Musrenbang Digital Berdasarkan Konteks Wilayah

3.1.2. Persepsi terhadap Inklusivitas dan Transparansi Musrenbang Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang digital dipersepsikan mampu memperluas ruang partisipasi masyarakat serta meningkatkan keterbukaan proses perencanaan pembangunan. Platform digital dinilai memberi kesempatan yang lebih setara bagi warga untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus hadir secara fisik dalam forum Musrenbang konvensional. Kelompok usia muda menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi, yang mengindikasikan keterkaitan antara familiaritas teknologi dan intensitas partisipasi. Dari sisi transparansi, responden menilai bahwa Musrenbang digital memudahkan akses terhadap informasi perencanaan serta memungkinkan pemantauan proses dan status aspirasi secara lebih terbuka. Temuan ini diperkuat oleh data aktivitas pengguna yang menunjukkan keterlibatan berulang dalam mengakses informasi pada platform Musrenbang digital. Ringkasan persepsi responden terhadap inklusivitas, transparansi, dan efektivitas tindak lanjut aspirasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Persepsi Responden terhadap Platform Musrenbang Digital

Indikator	Setuju & Sangat Setuju (%)
Platform lebih inklusif	72
Transparansi meningkat	81
Aspirasi ditindaklanjuti	62

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

3.1.3. Efektivitas Tindak Lanjut Aspirasi dan Faktor Penentunya

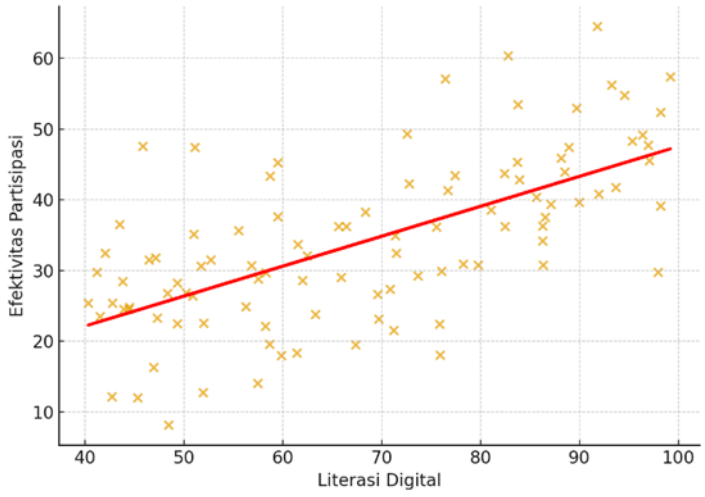
Meskipun Musrenbang digital dinilai inklusif dan transparan, efektivitas tindak lanjut aspirasi masyarakat masih dipersepsikan belum optimal. Tidak seluruh responden merasakan bahwa aspirasi yang disampaikan melalui platform digital benar-benar memengaruhi keputusan pembangunan. Kesenjangan persepsi ini tampak lebih kuat antara responden perkotaan dan perdesaan, yang mengindikasikan peran penting faktor struktural dalam menentukan kualitas partisipasi.

Analisis hubungan antarvariabel menunjukkan bahwa efektivitas partisipasi lebih ditentukan oleh kapasitas pengguna dan dukungan infrastruktur dibandingkan oleh karakteristik demografis semata. Responden dengan literasi digital yang lebih baik cenderung melaporkan pengalaman partisipasi yang lebih efektif, sedangkan keterbatasan akses dan kemampuan digital menjadi penghambat utama, khususnya bagi kelompok usia yang lebih tua. Hasil regresi linier berganda yang dirangkum pada Tabel 3 menegaskan bahwa literasi digital dan akses infrastruktur merupakan faktor paling berpengaruh terhadap efektivitas partisipasi publik dalam Musrenbang digital.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien β	t	Sig. (p)
Literasi digital	0,31	4,25	0,000
Akses infrastruktur	0,28	3,87	0,000
Usia	-0,19	-2,56	0,011

Gambar 2 berikut berfungsi untuk memperlihatkan pola hubungan empiris yang tidak sepenuhnya tertangkap melalui koefisien regresi. Visualisasi ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital tidak hanya berkorelasi secara statistik dengan efektivitas partisipasi, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan konsistensi pengalaman partisipasi pada tingkat literasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada tingkat literasi rendah, efektivitas partisipasi cenderung lebih terfragmentasi, yang mengindikasikan bahwa keterbatasan literasi digital berkontribusi pada ketidakmerataan manfaat Musrenbang digital.



Gambar 2. Pola Konsistensi Efektivitas Partisipasi Berdasarkan Tingkat Literasi Digital

3.1.4. Ringkasan Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, terdapat empat temuan utama. Pertama, Musrenbang digital secara konsisten meningkatkan inklusivitas dan transparansi partisipasi publik. Kedua, efektivitas partisipasi masih terbatas karena tidak seluruh aspirasi masyarakat ditindaklanjuti secara substantif. Ketiga, literasi digital dan akses infrastruktur merupakan faktor kunci yang menentukan kualitas partisipasi publik. Keempat, masih terdapat kesenjangan partisipasi antar kelompok usia dan wilayah, yang menunjukkan bahwa digitalisasi Musrenbang belum sepenuhnya menghasilkan inklusivitas substantif.

3.2. Diskusi

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang digital berfungsi sebagai sarana perluasan akses dan peningkatan transparansi dalam perencanaan pembangunan, sejalan dengan literatur yang menekankan potensi e-participation untuk membuka ruang deliberatif yang lebih inklusif (Gherghina et al., 2023). Namun, peningkatan akses ini tidak otomatis menghasilkan kualitas partisipasi yang lebih substantif, terlihat dari masih terbatasnya persepsi masyarakat mengenai efektivitas tindak lanjut aspirasi. Dengan demikian, platform digital belum secara konsisten memperkuat pengaruh publik terhadap keputusan kebijakan, sebagaimana juga diidentifikasi oleh (Musiatowicz-Podbial, 2024) dalam konteks partisipasi digital di negara lain.

Faktor kunci dari keberhasilan partisipasi digital pada studi ini adalah literasi digital dan akses infrastruktur. Kedua faktor ini tidak hanya meningkatkan peluang warga untuk memasuki ruang partisipasi, tetapi juga memengaruhi kemampuan mereka memahami alur pengajuan aspirasi, memantau proses, serta menilai kualitas informasi yang tersedia. Hal ini menegaskan bahwa kualitas partisipasi publik bukan sekadar jumlah keikutsertaan bergantung pada kapasitas warga dalam memaknai, mengolah, dan memanfaatkan fitur-fitur deliberatif platform digital (Veronika Stein et al., 2025). Temuan ini konsisten dengan argumen (Guess & Munger, 2023) yang menempatkan literasi digital sebagai prasyarat bagi keterlibatan politik yang bermakna di ruang daring.

Ketimpangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah perdesaan serta pada kelompok usia yang lebih tua, berdampak langsung pada ketidakmerataan kualitas partisipasi (Hao Ji et al., 2024). Mereka yang memiliki kapasitas digital lebih rendah cenderung mengalami hambatan dalam memahami mekanisme platform serta memanfaatkan fitur pemantauan aspirasi (Park, 2025). Kondisi ini memperkuat temuan (Perikangas & Tuurnas, 2024) bahwa inklusivitas digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan platform, tetapi juga oleh kesesuaian antar desain layanan, kapasitas pengguna, dan kondisi struktural di tingkat lokal. Dengan demikian, pemanfaatan Musrenbang digital belum menghasilkan "inklusivitas substantif", melainkan baru pada tahap peningkatan akses prosedural (Qadourah, 2026).

Dalam perspektif demokrasi partisipatif berbasis teknologi, Musrenbang digital berpotensi berfungsi sebagai instrumen penguat demokrasi karena menyediakan ruang artikulasi aspirasi yang lebih luas dan terdokumentasi secara transparan (George Asimakopoulos et al., 2025). Namun, temuan penelitian ini harus dipahami dengan hati-hati. Mengingat desain penelitian bersifat cross-sectional berbasis persepsi, hubungan yang ditemukan hanya menunjukkan keterkaitan empiris, bukan bukti kausal mengenai transformasi demokrasi atau peningkatan efektivitas kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Townley & Koop, 2024) bahwa digitalisasi partisipasi publik kerap menunjukkan potensi inovatif tanpa memberikan bukti langsung terhadap perubahan struktural dalam proses pengambilan kebijakan. Karena itu, meskipun Musrenbang digital membuka peluang demokratisasi yang lebih kuat, bukti empiris dalam penelitian ini baru menunjukkan potensi, bukan dampak kebijakan yang bersifat transformatif (Lai, 2025).

Implikasi temuan ini memberikan penegasan bahwa digitalisasi partisipasi publik harus diperlakukan sebagai ekosistem, bukan sekadar kanal teknologi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan literasi digital dan pemerataan infrastruktur berjalan paralel dengan penguatan mekanisme tindak lanjut aspirasi (Sundberg & Holmström, 2024). Tanpa komponen-komponen tersebut, Musrenbang digital berisiko hanya menjadi medium partisipasi administratif, bukan wadah deliberasi yang memperkuat kualitas demokrasi lokal. Selain itu, dibutuhkan perbaikan desain sistem untuk mengatasi kesenjangan pengalaman partisipasi antara kelompok muda yang melek teknologi dan kelompok rentan yang memiliki kapasitas digital terbatas (Kebede et al., 2022).

Penelitian ini juga memperluas diskursus e-governance dengan menunjukkan bahwa teknologi digital memengaruhi kualitas demokrasi bukan melalui keberadaan platform itu sendiri, melainkan melalui mediasi kapasitas pengguna dan dukungan struktural. Dengan demikian, temuan ini mengonfirmasi bahwa kualitas partisipasi digital ditentukan oleh interaksi antara desain institusional, kesiapan sosial-teknologis, dan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi publik (Miroslava Tokovska et al., 2023). Hal ini mempertegas bahwa efektivitas Musrenbang digital sebagai instrumen demokrasi partisipatif bergantung pada kemampuan ekosistem digital untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat dipahami, disaring, dan ditindaklanjuti secara akuntabel.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

Penelitian ini menunjukkan bahwa Musrenbang digital meningkatkan inklusivitas dan transparansi partisipasi publik, namun belum sepenuhnya menghasilkan pengaruh substantif terhadap keputusan kebijakan. Efektivitas partisipasi terutama ditentukan oleh literasi digital dan ketersediaan infrastruktur, sementara kelompok usia lanjut dan masyarakat perdesaan masih menghadapi keterbatasan akses dan kapasitas. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan partisipasi digital tidak bergantung pada platform semata, melainkan pada interaksi antara desain sistem, kapasitas pengguna, dan responsivitas pemerintah. Secara praktis, pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan literasi digital, pemerataan infrastruktur, serta mekanisme tindak lanjut aspirasi yang transparan agar Musrenbang digital tidak berhenti pada partisipasi prosedural, tetapi berkontribusi nyata pada kualitas kebijakan publik.

REFERENSI

Anindito, D. B., Sagala, S. A. H., & Tarigan, A. K. M. (2022). E-Musrenbang: A Digital Framework for Local Participatory Planning at the Community Level. *International Development Planning Review*, *44*(2), 191–216. https://doi.org/10.3828/idpr.2021.5

APJII Indonesia. (2023). *Internet Indonesia: Survei Penetrasi Internet Indonesia*. https://apjii.or.id/download_survei/1b5d0968-ccc7-4f21-bed5-ac9962cb17f1

Cemil Eren Fırtın et al. (2025). Public Money & Management Digital Accountability through E-Participation: the Moderating Role of the Digital Divide. *Public Money & Management*, *0962*, 1–13. https://doi.org/10.1080/09540962.2025.2573784

Asimakopoulos, G., Antonopoulou, H., Giotopoulos, K., & Halkiopoulos, C. (2025). Impact of Information and Communication Technologies on Democratic Processes and Citizen Participation. *Societies, 15*(2), 40. https://doi.org/10.3390/soc15020040

Gherghina, S., Tap, P., & Soare, S. (2023). Participatory Budgeting and the Perception of Collective Empowerment: Institutional Design and Limited Political Interference. *Acta Politica*, *58*(3), 573–590. https://doi.org/10.1057/s41269-022-00273-4

Guess, A. M., & Munger, K. (2023). Digital Literacy and Online Political Behavior. *Political Science Research and Methods*, *11*(1), 110–128. https://doi.org/10.1017/psrm.2022.17

Gustavo De Siqueira et al. (2022). Digitalization, Participation and Interaction: Towards More Inclusive Tools in Urban Design—A Literature Review. *Sustainability*, *14*(8), 1–13. https://doi.org/10.3390/su14084514

Hao Ji et al. (2024). Associations between Digital Literacy, Health Literacy, and Digital Health Behaviors among Rural Residents: Evidence from Zhejiang, *International Journal for Equity in Health*, 1–20. https://doi.org/10.1186/s12939-024-02150-2

Hiroki Miura et al. (2025). Citizen Participation and Political Efficacy at the Grassroots Level: The Case of Residents' Self-Governance Associations in Seoul , South Korea. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, *36*(2), 204–216. https://doi.org/10.1007/s11266-024-00708-w

Kebede et al. (2022). Digital Engagement of Older Adults: Scoping Review. *Journal of Medical Internet Research*, *24*(12), 1–20. https://doi.org/10.2196/40192

Impact of Political Efficacy on Citizens' E-Participation in Digital Government. *Administrative Sciences, 15*(1), 17. https://doi.org/10.3390/admsci15010017

Miroslava Tokovska et al. (2023). E-Government—The Inclusive Way for the Future of Digital Citizenship. *Societies*, *13*(6), 1–14. https://doi.org/10.3390/soc13060141

Mohammed Adnan et al. (2022). Telematics and Informatics Reports E-Participation within the Context of E-Government Initiatives: A Comprehensive Systematic Review. *Telematics and Informatics Reports*, *8*, 100015. https://doi.org/10.1016/j.teler.2022.100015

Muhammet Ali Heyik et al. (2024). Exploring Citizens' Perspectives on Participatory Design and Planning: A Comparative Study Across Three Capital Cities. *Urban Governance*, *4*(2), 101–112. https://doi.org/10.1016/j.ugj.2024.03.003

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

Musiatowicz-Podbial, G. (2024). How Digital Platforms Create Public Value through Government-Citizen Collaboration? *ACM International Conference Proceeding Series*, 415–422. https://doi.org/10.1145/3657054.3657105

Nincevic Pasalic, I., & Cukusic, M. (2024). Understanding E-Participation Adoption: Exploring Technological, Organizational, and Environmental Factors. *Technological Forecasting and Social Change*, *207*, 123633. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123633

Park, E. (2025). Factors Related to Digital Literacy in People with Disabilities: Focus on Self-Efficacy and Attitude toward Digital Devices and Technology. *International Review of Economics and Finance*, *104*, 104671. https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104671

Perikangas, S., & Tuurnas, S. (2024). Design for Inclusive Digital Co-Production. *Public Management Review*, *26*(6), 1731–1751. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2224819

Putra Rizkiya et al. (2023). The impact of E-Musrenbang Implementation on Development Planning Process in Banda Aceh City, Indonesia. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, *6*(2), 140. https://doi.org/10.52626/jg.v6i2.258

Qadourah, J. A. (2026). Results in Engineering Socio-Economic and Cultural Readiness for Digital Participatory Planning: Stakeholder Insights from Jordan. *Results in Engineering*, *29*, 108875. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.108875

Rinawati, N., Ratnawati, H., & Putranti, D. (2022). Faktor-Faktor Penentu Kepuasan Kerja PNS yang Menghadapi Masa Pensiun di Pemerintah Kabupaten Batang. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, *1*(3), 106–120. https://doi.org/10.51903/jimeb.v1i3.418

Setyawan, R., Raharjo, B., & Dewayani, J. (2024). Governance in the Digital Era: Analyzing the Adoption of E-Government Services in Local Authorities through Quantitative Methods. *Journal of Management and Informatics*, *3*(3), 434–450. https://doi.org/10.51903/jmi.v3i3.54

Shin, B., Floch, J., Rask, M., Bæck, P., Edgar, C., Berditchevskaia, A., Mesure, P., & Branlat, M. (2024). A Systematic Analysis of Digital Tools for Citizen Participation. *Government Information Quarterly*, *41*(3), 101954. https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101954

Sundberg, L., & Holmström, J. (2024). *Citizen-Centricity in Digital Government Research: A Literature Review and Integrative Framework*. *29*, 55–72. https://doi.org/10.3233/IP-220047

Townley, C., & Koop, C. (2024). Exploring the Potential and Limits of Digital Tools for Inclusive Regulatory Engagement with Citizens. *Government Information Quarterly*, *41*(1), 101901. https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101901

Veronika Stein et al. (2025). Digital Political Participation for Rural Development: Necessary Conditions and Cultures of Participation. *The Information Society*, *41*(1), 18–32. https://doi.org/10.1080/01972243.2024.2407339

Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, *17*(2), 410–418. https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2019